
KATA PENGANTAR

Pada era demokrasi seperti saat ini dan sebagai dampak dari desentralisasi dan globalisasi, salah satunya dapat dilihat dari adanya beberapa Kabupaten, Kota, dan Propinsi baru, yang pada dasarnya pembentukan/pemekaran Kabupaten, Kota, dan Propinsi baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Pusat terus berupaya untuk berperan sebagai pembina melalui penerbitan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi para pembuat keputusan dalam pembentukan/pemekaran Kabupaten/Kota/Propinsi sehingga Kabupaten/Kota/Propinsi yang akan terbentuk dapat menjadi daerah otonomi.

Untuk menghindari kesulitan dalam pembentukan/pemekaran daerah pemerintahan baru dalam mencapai tujuan tersebut di atas, disusunlah sebuah pedoman sebagai salah satu acuan untuk menilai kelayakan pembentukan/pemekaran suatu Kabupaten/Kota/Propinsi. Kriteria Penilaian Pembentukan/Pemekaran Kabupaten/kota/Propinsi ini disusun untuk melengkapi PP no. 129 tahun 2000 dengan penekanan penilaian pada aspek Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah.

Kami berharap dengan adanya Kriteria Penilaian ini para pengguna tidak berhenti pada satu acuansaja, namun terus mengembangkannya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Selanjutnya kami akan selalu terbuka dalam menerima masukan, saran dan kritik bagi penyempurnaan Kriteria Penilaian ini. Terima kasih.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Direktur Jenderal Penataan Ruang

ř

ř

ř

č

ě I1

1řřřO'

Ir. Sjarifuddin Akil
